

## Mengkaji Perkembangan Partisipasi Warga Negara Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Karina Asiyah Dwitasari  
Universitas Pendidikan Indonesia

Korespondensi penulis: [karinasiyah@upi.edu](mailto:karinasiyah@upi.edu)\*

**Abstract.** *The discussion of citizen participation in governance is not an entirely new one. Citizen participation is an important aspect of good governance, using its role as an integral part of human rights. Participation is able to encourage citizens to participate in giving consideration, supervision, and evaluation of the implementation of government. So that maladministration efforts can be prevented to a minimum. In this case, citizen involvement in government is the core of democratic life and the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs). This research uses a qualitative approach with a literature review research method. This article explains the development of the meaning, implementation, and challenges faced by the development of citizen participation. Efforts that can be used to overcome obstacles to citizen participation are also discussed. This study shows that the development of participation is expected to increase citizen involvement to the maximum. In addition, this article also focuses on the need for meaningful citizen participation in realizing good governance.*

**Keywords:** *Participation, Citizens, Good governance*

**Abstrak.** Pembahasan mengenai partisipasi warga negara dalam tata kelola pemerintahan bukanlah sesuatu hal yang baru. Partisipasi warga negara menjadi aspek penting terlaksananya pemerintahan yang baik, dengan menggunakan perannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Partisipasi mampu mendorong warga negara untuk turut serta memberika pertimbangan, pengawasan, dan evaluasi terlaksananya pemerintahan. Sehingga usaha maladministrasi bisa dicegah seminimal mungkin. Dalam hal ini, keterlibatan waga negara dalam pemerintahan menjadi inti kehidupan demokrasi serta terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kajian pustaka. Adapun artikel ini menjelaskan perkembangan makna, implementasi, dan tantangan yang dihadapi perkembangan partisipasi. Upaya-upaya yang dapat digunakan dalam mengatasi hambatan partisipasi warga negara tidak luput untuk dibahas. Kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan partisipasi yang terjadi diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan warga negara secara maksimal. Selain itu, artikel ini menyoroti perlunya partisipasi warga negara yang bermakna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Kata kunci:** Partisipasi, Warga negara, Pemerintahan yang baik

### LATAR BELAKANG

Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang jujur, adil, dan responsif, telah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Terutama dalam hal menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. Sebab sudah tidak terhitung lagi upaya-upaya pencederaan nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini, partisipasi warga negara memiliki peran penting dalam merealisasikannya. Menurut Gaventa (2002, hlm. 1), menegaskan bahwa seiring meningkatnya kekhawatiran mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan daya tanggap negara, keterlibatan masyarakat dan pengajuan tuntutan terhadap negara menjadi dipertanyakan.

Sebagaimana pandangan Sen dan Coskun (2022, hlm. 211), yang menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan antara aktor pemerintah dan terwujudnya partisipasi warga negara dapat mendorong pemerintahan yang mengedepankan prinsip keterbukaan, transparansi, dan

akuntabilitas. Sejalan dengan itu, United Nations E-Government Surveys (2022), menjelaskan bahwa partisipasi warga negara adalah bagian vital dalam mekanisme pemerintahan, sebagai berikut

*The vacuity of public participation mechanisms is vital because genuine progress is insolvable unless individualities have a way to express their requirements, give feedback, and impact the direction of original.* (hlm. 87)

Selanjutnya, OECD (2022) memaparkan kebaikan yang dapat diperoleh dalam partisipasi warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sebagai berikut

*Citizen participation in public decision making can answer the concerns of minorities and unrepresented groups by addressing inequalities of voice and access, and thus fight exclusion and marginalisation. This in turn can produce better programs and services, make a sense of belonging, and foster social cohesion.* (hlm. 16)

Selanjutnya diungkapkan oleh United Nations E-Government Surveys (2022), yang menyebutkan bahwa kunci penting jalannya pemerintahan adalah partisipasi warga negara, sebagai berikut

*Public participation is a crucial dimension of governance, and its significance is stressed in a number of SDG pointers and targets, including target 16.7, which calls for being “responsive, inclusive”.* (hlm. 40)

Lebih lanjut terwujudnya partisipasi masyarakat dapat memberikan dampak pada peningkatan kesadaran tentang cara kerja lembaga publik yang memungkinkan warga negara mengakses kebutuhan layanan yang diperlukan lebih baik (Chitondo, 2022, hlm. 49). Senada dengan hal tersebut, HeeKyung (2019) berpendapat bahwa *building human and social capital achieved by citizen participation is critical as a basis for community well-being* (hlm. 186).

Membahas tentang partisipasi, keberadaannya merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Addink (2019) dalam [www.academic.oup.com](http://www.academic.oup.com), yang menjelaskan terdapat enam prinsip dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu kelayakan, transparansi, partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, dan kemanusiaan.

Pelaksanaan partisipasi memiliki dasar normatif dalam hak asasi manusia sebagai prinsipnya. Kemudian Fox dan Stoett (2016, hlm. 558), menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, sebab warga negara adalah subjek utama pembangunan dan harus menjadi peserta aktif dalam penerima hak atas pembangunan tersebut.

Selain itu, partisipasi warga negara menjadi aspek pokok dalam kehidupan demokrasi yang baik dan modern (Muchtar, 2020, hlm. 293). Sebagaimana mengutip *World Public Sector Report 2023*, menjelaskan bahwa ruang sipil yang memungkinkan warga negara untuk

berpartisipasi dan menggunakan kebebasan sipil merupakan kontrak sosial dalam demokrasi (hlm. 14). Sedangkan menurut OECD, (2022) menegaskan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan jalanya demokrasi akan terwujud melalui partisipasi warga negara, sebagai berikut

*As a core pillar of an open government, citizen participation has natural benefits. It leads to better and further popular policy timber, which becomes further transparent, inclusive, licit, and responsible. Citizen participation enhances public trust in government and popular institutions by giving citizens a part in public decision making.* (hlm. 16)

Terlibat aktifnya partisipasi warga negara dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah menjadi penentu tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sriskandarajah, 2018, hlm. 1). Selanjutnya UNU-CS (2018), menyebutkan bahwa dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menegaskan bahwa peran warga negara merupakan mitra yang secara aktif terlibat dalam memantau kemajuan tujuan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kinerjanya (hlm. 9). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), bahwa terlibatnya warga negara menjadi proses yang dilakukan pemerintah paling inklusif terhadap masyarakat sipil (Senit, 2019, hlm. 694).

Dalam perjalannya, partisipasi warga negara selalu dihadapkan dengan dinamika. Perubahan atau pengembangan yang dilakukan sebagai usaha mencapai partisipasi warga negara yang maksimal. Sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik akan mudah dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya membahas perkembangan partisipasi warga negara secara komprehensif dalam mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik.

## **METODE PENELITIAN**

Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat. Kajian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif mendorong penelitian yang bersifat deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka, dengan melakukan penelaahan terhadap buku, artikel jurnal, laporan, dan catatan yang berhubungan dengan perkembangan partisipasi warga negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perpektif Partisipasi Warga Negara terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Secara etimologi, partisipasi warga negara terdiri dari dua kata berbeda. Kata partisipasi secara luas menurut Nurmandi, dkk. (2015, hlm. 123) memiliki arti tidak hanya hak dalam memilih dalam pemilu, debat, atau ikut serta dalam rapat kelompok tetapi juga kontribusi dalam segala prasarana kerja. Sedangkan kata warga negara secara luas menurut Çolak, (2022, hlm. 248), bukan hanya sebagai konsumen dari pelayanan publik tetapi juga sebagai produsen.

Selain itu, partisipasi warga negara memiliki banyak makna tergantung kepada sudut pandang yang dipilih, hal tersebut sebada dengan pendapat Wangert (1976), yang menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi makna dari partisipasi warga negara, sebagai berikut *Similary the phase “public participation” and “citizen involvement” have many meanings and connotation, depending on the situation to which applied and the ideology, motivations, and patical orientations of the user.* (hlm. 23)

Selanjutnya André (2012) menjelaskan lebih spesifik mengenai pengetian partisipasi warga negara sebagai suatu proses seseorang untuk ambil bagian dalam suatu komunitas.

Berikut penjelasanya

*Citizen participation may be defined as a process in which ordinary people take part, whether on a voluntary or obligatory base and whether acting alone or as part of a group with the thing of impacting a decision involving significant choices that will affect their community.* (hlm. 1)

Sedangkan mengutip dari [www.aip2.or.id](http://www.aip2.or.id), Arnstein (1969) berpendapat bahwa partisipasi warga negara merupakan suatu kekuatan masyarakat dalam menentukan produk akhir, serta sejauh mana kekuasaan tersebut mampu menentukan rencana dan program. Selain itu, menurut OECD (2022, hlm. 13) menjelaskna bahwa partisipasi warga negara adalah berbagai jalan yang digunakan warga negara untuk terlibat dalam alur kebijakan dan rancangan pelayanan.

Selanjutnya Nabatchi (2012), menjelaskan bahwa partisipasi warga negara dapat diartikan sebagai suatu proses yang secara luas menekankan pada keprihatinan, kebutuhan, dan nilai-nilai publik yang dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan (hlm. 6). Lebih lanjut, Nabatchi (2012, hlm. 8) menjelaskan tentang asumsi dan realitas mengenai makna dari partisipasi warga negara, sebagai berikut.

**Tabel 1. Asumsi dan Realitas tentang Partisipasi Warga Negara**

Asumsi	Realitas
Partisipasi dipimpin oleh pemerintah.	Partisipasi dapat diselenggarakan di berbagai sektor (misalnya, sektor sipil, pemilu, legislatif, administratif). Hal ini mungkin diarahkan dan dipimpin oleh pemerintah, pemerintah merupakan salah satu dari banyak pemain, atau pemerintah mungkin tidak terlibat sama sekali.
Partisipasi difokuskan pada pengambilan keputusan dan membantu mengarahkan alokasi sumber daya pemerintah.	Partisipasi dapat dilakukan untuk alasan selain pengambilan keputusan. Bahkan ketika terfokus pada pengambilan keputusan, partisipasi mungkin tidak (dan sering kali tidak diperlukan) mengatasi permasalahan alokasi sumber daya.
Partisipasi bersifat periodik dan sementara.	Beberapa proses partisipasi merupakan upaya yang dilakukan sekali saja atau dilakukan secara berulang-ulang, baik untuk isu yang berkelanjutan atau dalam konteks yang berbeda namun dalam konteks yang sama. Proses lainnya masih bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.
Warga negara ingin berpartisipasi aktif dalam pekerjaan pemerintahan.	Warga negara mungkin tidak ingin terlibat dalam pengambilan keputusan, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin menghadapi hambatan nyata (misalnya waktu, uang) untuk berpartisipasi.
Masyarakat dapat dan bisa membantu merancang bagaimana mereka akan terlibat dalam proses partisipatif	Selain tingkat kepentingan dan hambatan lainnya, masyarakat mungkin tidak memahami berbagai fitur desain partisipatif. Selain itu, harapan mereka untuk berpartisipasi mungkin tidak sesuai dengan persyaratan undang-undang, peraturan administratif, dan mandat lainnya
Warga negara memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing, serta sadar akan kebutuhan dan kepentingan pihak terkait lainnya.	Warga negara mungkin tidak mempunyai akses informasi yang diperlukan untuk menilai kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri, apalagi kepentingan dan kebutuhan orang lain. Sekalipun mereka memiliki informasi ini, masyarakat mungkin akan lebih mementingkan kebutuhan dan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan yang lebih luas.
Pemerintah mempunyai cukup waktu, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk melibatkan masyarakat untuk memecahkan masalah publik yang kompleks.	Pemerintahan saat ini beroperasi dalam kondisi kelangkaan sumber daya, dan gagasan “berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit” mungkin tidak sesuai dengan harapan akan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

*Sumber: A Manager's Guide to Evaluating Citizen Participation.*

Selain itu, terdapat beberapa pengkategorian konsep partisipasi warga negara. Dalam konteks tingkatan partisipasi, terdapat dua konsep terkenal yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (1969), yaitu *Ladder of Citizen Participation* dan *Eight Level of Public Participation*. Konsep *ladder* menjelaskan delapan tingkatan berbeda dari partisipasi warga negara, mulai dari tingkatan non partisipasi sampai tingkatan kontrol warga negara yang menggambarkan tingkat daya yang dimiliki warga negara dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Sedangkan *eight level* merupakan perkembangan yang lebih menyeluruh dari konsep dasar Arnstein sebelumnya, yang masing-masing tingkatan mewakili tingkat keterlibatan warga yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Konsep tersebut menyediakan kerangka kerja dalam memahami tingkat keterlibatan warga negara dan kendali atas keputusan dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat.

## **Praktik Partisipasi Warga Negara terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Dalam praktiknya partisipasi warga negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menjadi sukarelawan, mengikuti kampanye, atau terlibat dalam pembuatan keputusan anggaran pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kaunda dan Isaac (2018), yang berpendapat bahwa partisipasi warga negara dapat dilakukan berbagai cara, sebagai berikut.

*Citizen involvement in local governance can happen through various means such as state forums, legislations, NGOs, social movements or creation of parallel governance structures, non-formal forms of citizen action are significant as they symbolize the transition from representative democracy to participatory democracy* (hlm. 4).

Sedangkan menurut Addink (2019) dalam [www.academic.oup.com](http://www.academic.oup.com), menjelaskan bahwa bentuk partisipasi warga negara bisa dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu inisiatif populer, panel kewarganegaraan, referendum, dan komunitas lokal. Lebih lanjut, Ploštajner dan Mendeš (2014, hlm. 99-100) menjelaskan tentang beberapa bentuk baru partisipasi warga negara yaitu

1. Warga negara secara mandiri terlibat dalam melobi atau mempengaruhi kebijakan publik. Sehingga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keputusannya.
2. Warga negara membentuk berbagai aliansi untuk memperkasai, mengusulkan, atau mengomentari regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah, guna memberikan pertimbangan atas prioritas masalah yang harus diselesaikan.
3. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memungkingkan penggunaan internet menjadi alat komunikasi antara warga dan pemerintah untuk mendiskusikan berbagai macam masalah. Peningkatan akses ini berdampak pada peningkatan demokrasi dan meningkatkan warga negara untuk berpartisipasi,
4. Terbukanya ruang publik yang memberikan kesempatan bagi warga negara dan pemerintah untuk mendiskusikan program-program bersama dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Adanya perkembangan implementasi partisipasi warga negara mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberikan pertimbangan kepada pemangku kebijakan terkait dengan kebijakan yang diambil, mengawasi setiap pelaksanaan kebijakan, dan memberikan evaluasi sebagai kritik dan saran agar kebijakan yang diambil lebih baik.

## **Tantangan Mengembangkan Partisipasi Warga Negara terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Perkembangan partisipasi warga negara dalam pemerintahan tentunya tidak luput dari tantang yang menjadi hambatan terlaksananya partisipasi yang sesungguhnya. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa keterlibatan warga negara dalam pemerintahan memberikan banyak keuntungan. Hal senada dikemukakan oleh (2015, hlm. 2) bahwa partisipasi merupakan cara yang efektif dalam mencapai nilai-nilai tata pemerintahan yang baik.

Aspek dasar dalam tantangan pelaksanaan partisipasi warga negara yang efektif adalah kurangnya kecerdasan kewarganegaraan, sebab partisipasi yang dilakukan menjadi kurang berarti. Hal tersebut senada dengan pendapat Seungjong (1999, hlm. 115), bahwa peluang partisipasi warga negara akan berarti apabila kesadaran kewarganegaraannya mencukupi. Selanjutnya Muchtar (2022) juga yang menjelaskan bahwa kualitas partisipasi didasarkan pada kecerdasan masyarakatnya, sebagai berikut

Kajian teoritik menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas kadar partisipasi warga negara. Untuk itu, kualitas partisipasi memerlukan kecerdasan warga negara. (hlm. 301)

Sedangkan mengutip dari *World Public Sector Report 2023*, menjelaskan bahwa penurunan ruang sipil bagi masyarakat berakibat pada melebarnya kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat sipil dan dapat menimbulkan konsekuensi buruk terhadap terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan (hlm. 14). Hal tersebut tentunya dapat menjadi faktor menurunnya partisipasi warga negara dalam pemerintahan,

Selain itu, Fung (2015, hlm. 8-9) memberikan kesimpulan bahwa terdapat tiga tantangan yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan partisipasi warga negara. Pertama kurangnya daya kepemimpinan dalam pemerintahan yang sistematis, yang berakibat pada keberpihakan serta melemahkan tata kelola partisipatif sebab motif yang membangkitkan antusiasme awal warga negara untuk berpartisipasi memudar atau bergeser ke arah tujuan lain. Kedua kurangnya konsensus masyarakat dan elit mengenai peran partisipasi warga negara secara langsung, sehingga upaya memperjuangkan inovasi partisipatif warga negara menjadi jauh lebih sulit.

Selanjutnya, ketiga keterbatasan ruang lingkup dan kewenangan inovasi yang partisipatif bagi warga negara dalam pemerintahan.

Tentunya, tantangan-tantangan tersebut akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan bentuk implementasi partisipasi warga negara. Banyak faktor eksternal seperti teknologi dan keadaan lingkungan yang tidak luput dalam mempengaruhi perkembangan partisipasi warga negara.

## Upaya Meningkatkan Partisipasi Warga Negara terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Terjadinya hambatan pelaksanaan perkembangan warga negara dalam kehidupan demokrasi tentunya perlu dilakukan perbaikan. Beragam pendekatan dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wengert (1976, hlm. 23), yang berpendapat bahwa untuk mendorong partisipasi warga negara tergantung pada perspektif pendekatan subjek, konteks kelembagaan, politik, ekonomi, minat pribadi, dan sudut pandang seseorang.

Menurut Gaventa (2022, hlm. 1), mengungkapkan kecenderungan untuk menanggapi kurangnya keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama memperkuat proses partisipasi dengan melibatkan masyarakat miskin dan menyalurkan suaranya melalui berbagai musyawarah, konsultasi dan/atau mobilisasi yang dapat memberikan informasi dan mempengaruhi lembaga dan kebijakan yang diambil. Kedua, memperkuat akuntabilitas dan daya tanggap lembaga-lembaga dan kebijakan-kebijakan dalam mendukung tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya menurut Fox dan Stoett (2016, hlm. 563), menjelaskan dua cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi warga negara. Pertama menjadi inklusif dan menjangkau kelompok-kelompok terpinggirkan dalam perancangan kebijakan. Kedua, melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, media, akademisi) dan berbagai saluran untuk menjangkau masyarakat.

Selain itu, dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan pada pengembangan partisipasi warga negara, pendidikan memerankan proses besar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemauan warga negara dalam melibatkan diri di bidang pemerintahan. Hal tersebut senada dengan laporan yang dikeluarkan oleh *World Public Sector Report 2023* menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mengatasi hambatan partisipasi warga negara secara efektif akibat kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemerintahan (hlm. 46).

Selanjutnya, Chitondo (2021) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dan politik yang menjadi inti dalam demokrasi, sebagai berikut

*Involvement of citizens in governance and political process is an essential part of republic and increased citizen participation in governance can only be enhanced through communal education.* (hlm. 49)

Memaksimalkan bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah cara yang efektif. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat secara umum dan menjadi upaya pencerdasan warga negara dalam keterlibatannya terhadap pemerintahan.

## KESIMPULAN

Peningkatan partisipasi warga negara dalam pemerintahan sudah seharusnya menjadi kewajiban dan bagian yang melekat dalam pemenuhan hak asasi manusia. Kehadiran partisipasi warga negara perlu untuk terus ditingkatkan melalui berbagai sudut pandang, sebagai upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pengembangan pandangan dan praktik partisipasi warga negara yang semakin beragam perlu dibarengi dengan kebermaknaan partisipasi yang sesungguhnya. Selain itu, adanya tantangan dalam upaya meningkatkan partisipasi warga negara juga perlu dicarikan solusinya yang tepat. Sehingga aspek partisipasi dalam pemerintahan yang baik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini terbatas hanya pada kajian literatur saja, sehingga diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan pendalaman dan pengkajian lebih luas.

## DAFTAR REFERENSI

- Addink, Henk. (2019). *Good Governace: Concept and Context*. Diakses dari [www.academic.oup.com](http://www.academic.oup.com).
- Andika, Pundarika Vidya. (2022). Mengenal Arnstein's Ladder dalam Menata Partisipasi Publik. Diakse pada 03 Februari 2023 dari [www.aip2.or.id](http://www.aip2.or.id).
- André, Pierre. (2012). *Citizen Participation. Encyclopedia Dictionary of Public Administration. The Reference for Understanding Government Action*. Diakses dari <https://www.uv.es>.
- Arnstein, Sherry. (1969). *Ledder of Citizen Participation*. Diakses pada 04 Februari 2024 dari [www.organizingengagement.org](http://www.organizingengagement.org).
- Chitondo, Lufeyo. (2022). *Effects of Civic Education on Youth Participation in the Tenets of a Democratic Society: A Case of Youths in Four Rural Wards of Bahati Constituency in Mansa District of Luapula Province. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL) Volume 10 Nomor 8 (hlm. 49-60)*.
- Çolak, Çağrı. (2022). *The New Public Governance: Is it a Paradigmatic Way to Overcome the Wicked Problems? Chapter 14. The Handbook of Public Administration Volume I*. Lyon: Livre de Lyon.
- Fox, Oliver dan Stoett, Peter. (2016). *Citizen Participation in the UN Sustainable Development Goals Consultation Process: Toward Global Democratic Governance?. Global Governance Volume 22 (hlm. 555-574)*.

- Gaventa, John. (2002). *Introduction: Exploring Citizenship, Participation and Accountability*. *IDS Bulletin Volume 33 Nomor 2*.
- HeeKyung, Sung. (2019). *Arts and Community Well-Being. Chapter 10. Community Quality-of-Life and Well-Being*. Switzerland: Springer Nature Switzerland.
- Kaunda, Zebedee dan Isaac, Mbewe. (2018). *Impact of Civic Education on Citizen Involvement in Local Governance: A Case Study of Kwambwa District. The International Journal of Multi-Disciplinary Research*.
- Muchtar, Suwarma Al. (2020). *Teori dan Konstitualisme Indonesia*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Nabatchi, Tina. (2012). *A Manager's Guide to Evaluating Citizen Participation. Fostering Transparency and Democracy Series 2*. New York: IBM Center for The Business of Government.
- Nurmandi, dkk. (2015). *Citizen Participation in Selected Local Governance of Asia Pacific Countries*. Yogyakarta : CV. Visitama.
- OECD. (2022). *OECD Guidelines for Citizen Participation Processes, OECD Public Governance Reviews*. Paris: OECD Publishing.
- Ploštajner, Zlata dan Mendeš, Ivona. (2014). *Citizens Participation* (hlm. 97-113). Diakses dari [www.library.fes.de](http://www.library.fes.de).
- Sen, Eyup dan Coskun, Bayram. (2022). *Rethinking Governance: Governance for State, Private Sector and Civil Society Organization: Chapter 12. The Handbook of Public Administration Volume I*. Lyon: Livre de Lyon.
- Seungjong, Lee. (1999). *Partisipasi dalam Politik Lokal dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Administrasi Publik Volume 37 Nomor 2. Korea Jurnal Public Administration*.
- Sriskandarajah, Dhananjayan. (2018). *Toward an Accountability Revolution? Citizen Participation and the SDGs. Work Paper. From Summit to Solution: Innovations in Implementing the Sustainable Development Goals*. New York: Brookings Institutions Press.
- United Nations E-Government Surveys. (2022). *The Future of Digital Government*. Diakses dari [www.publicadministration.un.org](http://www.publicadministration.un.org).
- United Nations. (2023). *Transforming Institutions to Achieve the Sustainable Development Goals After The Pandemic, World Public Sector Report 2023*. Diakses dari [www.publicadministration.un.org](http://www.publicadministration.un.org).
- UNU-CS (United University Institute on Computing and Society). (2018). *Engaging Citizens for Sustainable Development: Data Perpektif*. Diakses dari <http://cs.unu.edu>.
- Wengert, Norman. (1976). *Citizen Participation: Practice in Search of a Theory*. *Natural Resources Journal Volume 16 Nomor 23*. Diakses dari <https://digitalrepositorye.unm.edu/nrj/vol16/iss1/3>